

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022

No. Katalog : 4601001.63

No. ISSN : 2745-9160

No. Publikasi : 63000.2251

Ukuran Buku : 21,5 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii+61 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Cover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dicetak oleh:

CV. Samudera Wisesa

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ini menyajikan gambaran umum tentang keadaan politik dan keamanan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang disajikan antara lain data terkait pemilihan umum, keanggotaan DPRD, dan peristiwa tindak kejahatan, pelaku dan korban kejahatan. Data tentang sarana prasarana keamanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan juga dihadirkan dalam publikasi ini.

Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, KPUD, sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta hasil Pendataan Potensi Desa 2021.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan, publikasi pada masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data.

Banjarbaru, Desember 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Selatan



Martin Wibisono

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
Bab I Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Metodologi.....	7
2.1 Jenis dan Sumber Data	9
2.2 Konsep dan Definisi.....	9
2.3 Penjelasan Teknis.....	11
Bab III Gambaran Umum Keamanan	13
3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	15
3.2 Peristiwa Kejahatan, Pelaku dan Korban Tindak Kejahatan	16
Bab IV Gambaran Umum Politik.....	21
4.1 Pemilihan Umum	23
4.2 Karakteristik dan Peran DPRD	24
Lampiran	27

<https://kalsel.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	29
Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja, 2022	30
Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, Tahun 2022.....	31
Tabel 4. Jumlah Anggota Hansip/Linmas dan Rasio Hansip/Linmas per Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2022	32
Tabel 5. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2022	33
Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2022	34
Tabel 7. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Crime Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2022.....	35
Tabel 8. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2022	36
Tabel 9. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2022.....	37
Tabel 10. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan, Tahun 2022.....	38
Tabel 11. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Perkelahian Massal Setahun Terakhir Tahun 2022.....	41
Tabel 12. Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan Tahun 2022	43
Tabel 13. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Warga Untuk Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir, 2022.....	49
Tabel 14. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2019 Menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik	50
Tabel 15. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2019 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Kondisi 31 Desember 2022).....	53

Tabel 16.	Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Terakhir Menurut Kabupaten/Kota	54
Tabel 17.	Jumlah Penduduk yang Terdaftar. Menggunakan Hak Pilih. dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Gubernur 2020 Menurut Kabupaten/Kota	55
Tabel 18.	Jumlah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Terakhir Jumlah Putaran Pelaksanaan Pemilukada, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung Menurut Kabupaten/Kota.....	56
Tabel 19.	Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Terakhir serta Jabatan Sebelum Terpilih Menurut Kabupaten/Kota.....	57
Tabel 20.	Hasil Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Terakhir serta Jabatan Sebelum Terpilih Menurut Kabupaten/Kota.....	58
Tabel 21.	Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Menurut DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022	59
Tabel 22.	Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2022	16
Gambar 3.2 <i>Crime Clearance Rate</i> Menurut Kabupaten/Kota 2022.....	17
Gambar 3.3 Jumlah Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Jenisnya di Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	19
Gambar 3.4 Persentase Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Jenisnya di Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	19
Gambar 4.1 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menurut Asal Partai, 2019 – 2024	23

BAB I PENDAHULUAN



Keadaan politik dan keamanan di Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun mengalami perbaikan. Meskipun begitu, perkembangan maupun dinamikanya harus terus termonitor.

Pada 2022, terdapat

4.352 laporan

Tindak Kejahatan

Turun 21,19 persen dibanding 2021

Pada 2021,

1 dari **5** anggota DPRD adalah

Perempuan

Masih sama dibanding 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya momentum demokratisasi pada tahun 1998 dapat ditangkap sebagai bentuk perubahan dalam riil politik di Indonesia, dengan tuntutan paling dominan adalah adanya distribusi (pemencaran horizontal dan vertikal) *power* yang sebelumnya tersentral pada presiden. Dari kedua *level* tersebut yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal, yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah dengan mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat untuk kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ini tentunya menyebabkan dinamika kehidupan politik terutama di tingkat pemerintah daerah semakin berkembang.

Isu-isu bidang politik dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Permasalahan bidang politik dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik dan keamanan. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antarwaktu antarwilayah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan berupaya memenuhi kebutuhan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan. *Output* dari publikasi ini dapat dijadikan sebagai alat

untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

1.1.1. Politik

Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, kekuasaan, sistem pengambilan keputusan publik, kebijaksanaan umum, dan pembagian serta penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara demi tercapainya tujuan dari suatu negara.

Perkembangan politik merupakan sebuah kondisi yang mencakup seluruh ruang lingkup ilmu politik yang tumbuh, berkembang, atau mengalami kemunduran pada satu dekade kepemimpinan. Perkembangan politik di Indonesia sebagai bagian dari kehidupan sosial-politik, secara umum mengalami pasang surut. Perkembangan politik sebagai salah satu tujuan berpolitik, menjadi bagian dari pengertian-pengertian yang dibuat maupun sikap-sikap yang berkembang untuk mewujudkan politik sebagai bagian dari kualitas suatu bangsa. Politik juga menjadi acuan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bertransformasi pada kecapaian sistem yang baik, dan terjaminnya suatu pemerintahan yang baik.

1.1.2. Keamanan

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat kepada status keamanan di suatu wilayah. Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini menuntut pemangku kepentingan di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya perangkat keamanan di wilayah masing-masing.

Rasa aman adalah salah satu kebutuhan sosial setiap manusia yang merupakan kebutuhan fundamental selain kebutuhan biologis. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap manusia dan oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan rasa aman kepada seluruh rakyatnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah dan negara Indonesia wajib

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perkembangan situasi politik dan keamanan yang dinamis cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan ketersediaan informasi gambaran kondisi politik dan keamanan yang diharapkan bisa memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan yang dilakukan. Selain itu, dengan publikasi ini diharapkan bisa memberikan gambaran kondisi terakhir politik dan keamanan serta memonitornya dari waktu ke waktu.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah. Secara khusus, penyusunan publikasi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai kejadian tindak kriminalitas, ketersediaan aparat penegak hukum, konflik massal dan peran serta DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2022 ini menyajikan gambaran data terkait politik dan keamanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hingga tingkat kabupaten dan kota tahun 2022. Data terkait pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah mengacu pada pelaksanaan pemilihan umum terakhir. Sumber data lainnya yang digunakan adalah hasil pengumpulan data BPS. Salah satu sumber data adalah Pendataan Potensi Desa yang terakhir dilaksanakan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari empat bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 membahas tentang Metodologi. Bab 3 tentang Gambaran Umum Keamanan, yang membahas sarana dan prasarana keamanan wilayah dan peristiwa kejahatan, pelaku dan korban tindak kejahatan. Bab 4 tentang Gambaran Umum Politik yang membahas pemilihan umum, karakteristik dan peran DPRD.

<https://kalsel.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI



Data diperoleh dari :

Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022
Pendataan Podes 2021
Publikasi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2023
Data Sekunder dari Kepolisian, Bakesbangpol, dan KPU

BAB II METODOLOGI

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data sekunder BPS dan dinas/instansi terkait. Sumber data BPS berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022, Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022, dan pendataan Potensi Desa 2021. Sumber data dinas/instansi terkait antara lain kepolisian, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum.

2.2. Konsep dan Definisi

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 22/2007). Pemilu yang dicakup meliputi pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provins, pemilu Presiden, dan pemilu Gubernur, dan pemilu Bupati/Walikota.

Angka partisipasi penduduk dalam pemilu (*voters turn out*) adalah persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu

Golongan putih (golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran terdiri dari:

- **Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- **Peristiwa yang dilaporkan** ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- **Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian** adalah peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa; dalam hal delik aduan, pengaduan dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang; peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*; peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian; peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia dan peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan; turut melakukan kejahatan; menyuruh melakukan kejahatan; membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan; serta membantu melakukan kejahatan.

Klasifikasi pelaku kejahatan menurut umur (KUHP) :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

2.3. Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah :

a. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

b. Selang Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

c. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

BAB III

GAMBARAN UMUM KEAMANAN



Pada 2022, terdapat

4.352 laporan
Tindak Kejahatan
dengan persentase penyelesaian
81,11 persen

Pada 2022,

139 dari 100.000 penduduk
di Kalimantan Selatan berisiko
menjadi korban
Tindak Kejahatan

Narkotika dan Psikotropika
merupakan kejahatan dengan jumlah laporan terbanyak

BAB III

GAMBARAN UMUM KEAMANAN

3.1. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman di suatu wilayah tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana keamanan di wilayah tersebut. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 13 Kantor Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Resort Kota (Polresta), 135 Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) dan 39 pos polisi (tidak termasuk jumlah pos polisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tabalong). Berdasarkan jumlah kecamatan maka terdapat 6 Kabupaten/Kota yang telah memiliki kantor Polsek di masing-masing kecamatan. Kabupaten/Kota tersebut adalah Barito Kuala, Tapin, Tabalong dan Tanah Bumbu serta Banjarmasin dan Banjarbaru. Untuk Kabupaten/Kota lainnya masih terdapat penduduk warga suatu kecamatan yang harus ke kecamatan terdekat untuk mendapat pelayanan di tingkat Kantor Kepolisian Resort.

Hasil Pendataan Podes Tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 2.007 desa/kelurahan di Kalimantan Selatan terdapat sebanyak 1.756 desa yang harus ke desa lain untuk mendapatkan pelayanan di kantor polisi. Permasalahan sarana dan prasarana infrastruktur jalan sangat menentukan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang keamanan. Masih terdapat masyarakat di 128 desa/kelurahan yang mengalami kesulitan dan masyarakat 23 desa yang menyatakan sangat sulit untuk mengakses kantor polisi terdekat di desa lain.

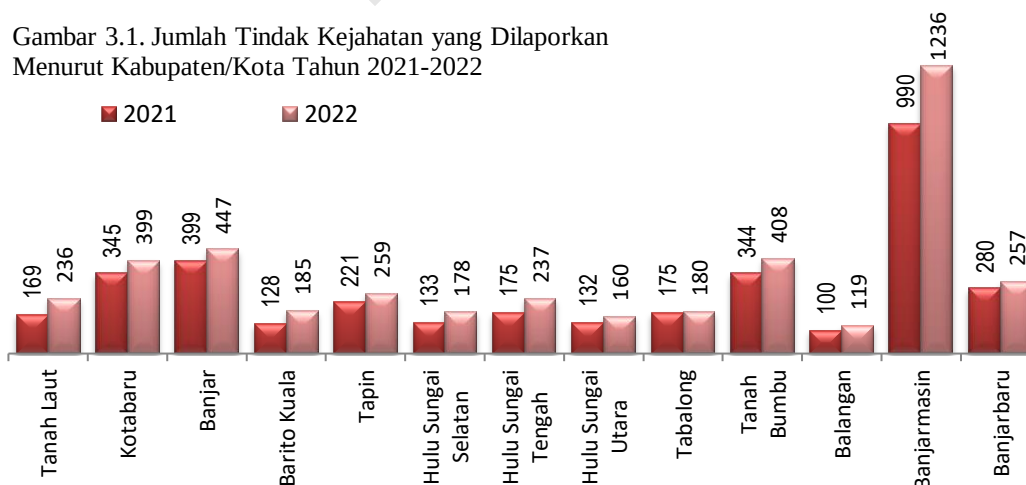
Jumlah dan kepadatan penduduk berdampak pada kompleksitas permasalahan keamanan yang menjadi penentu kebutuhan jumlah aparat kepolisian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat selain faktor lainnya seperti jarak, kondisi geografi dan tingkat kemajuan sosial ekonomi di suatu wilayah. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebanyak 4,170,17 juta jiwa. Kota Banjarmasin merupakan kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu sebanyak 9.220 jiwa menempati setiap km². Sedangkan rasio jumlah aparat kepolisian per penduduk di Kota Banjarmasin adalah sebesar 798. Hal ini berarti setiap 1 orang polisi yang bertugas di Kota Banjarmasin melayani hampir sekitar 798 orang penduduk.

Unsur pertahanan dan keamanan selain aparat polisi adalah anggota hansip dan linmas. Hansip/Linmas berperan untuk membantu menjaga keamanan di tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan hasil pendataan Podes 2021 tercatat terdapat sebanyak 13.467 orang Hansip/Linmas yang bertugas pada 2.007 desa/kelurahan. Kabupaten Balangan memiliki rasio anggota hansip/linmas per desa/kelurahan tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 15 orang. Artinya secara rata-rata satu desa/kelurahan di Kabupaten Balangan memiliki 15 orang anggota hansip dan linmas. Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya memiliki 1 orang Hansip/Linmas untuk setiap desa/kelurahan.

3.2. Peristiwa Kejahatan, Pelaku dan Korban Tindak Kejahatan

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, akan tetapi pada tahun 2022, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di 13 kantor polres dan polresta meningkat yaitu sebanyak 4.352 kasus (atau sebanyak 5780 kasus jika termasuk kasus yang ditangani Polda Kalsel). Angka ini mengalami peningkatan sebesar 21,19 persen dibandingkan tahun 2021. Kota Banjarmasin merupakan wilayah dengan jumlah tindak kejahatan tertinggi yang dilaporkan yaitu sebanyak 1236 kasus. Sebaliknya jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan paling sedikit selama 2022 adalah terjadi di Kabupaten Balangan, yaitu hanya 119 kasus.

Gambar 3.1. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022



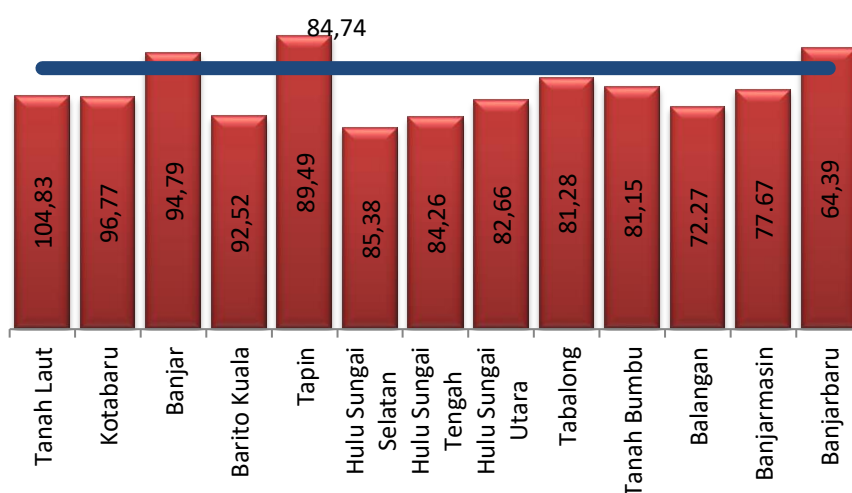
Pada tahun 2022, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan angka tindak kejahatan yang dilaporkan. Persentase kenaikan terbesar terjadi di Kota Banjarmasin yaitu sebesar 21,32 persen dibandingkan tahun

sebelumnya. Persentase peningkatan terbesar tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah Kabupaten Barito Kuala yaitu mengalami peningkatan sebesar 44,53 persen dibandingkan tahun 2021.

Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2022 diikuti dengan penurunan persentase penyelesaian tindak kejahatannya (*crime clearance rate*). *Crime clearance rate* Provinsi Kalimantan Selatan selama 2022 adalah sebesar 81,11 persen atau turun 5,63 poin dibandingkan tahun 2021. Kabupaten/kota dengan tingkat penyelesaian kejahatan tertinggi adalah Kabupaten Tapin dengan *crime clearance rate* sebesar 95,37 persen dan yang terendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebesar 65,17 persen.

Tingkat keamanan juga bisa diindikasikan dari selang waktu terjadinya tindak kejahatan (*crime clock*). Semakin pendek selang waktu terjadinya kejahatan menandakan lebih seringnya tindak kejahatan terjadi. Selama periode 2015-2020, selang waktu terjadinya tindak kejahatan di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2021 *crime clock* Kalsel turun dari 2 jam 10 menit 55 detik pada tahun 2020 menjadi 1 jam 44 menit 28 detik dan di tahun 2022 menjadi 1 jam 30 menit 56 detik

Gambar 3.2 *Crime Clearance Rate*
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022 (Persen)



Situasi dan kondisi keamanan di suatu wilayah juga dapat dilihat dari besarnya angka kejahatan (*crime rate*). Setiap penduduk memiliki risiko terkena tindak

kejahatan. Semakin besar *crime rate*, maka risiko penduduk yang terkena tindak kejahatan semakin besar dan ini menandakan berkurangnya tingkat keamanan. Risiko penduduk terkena tindak kejahatan di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2022 sebesar 139. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dimana angkanya sebesar 122.

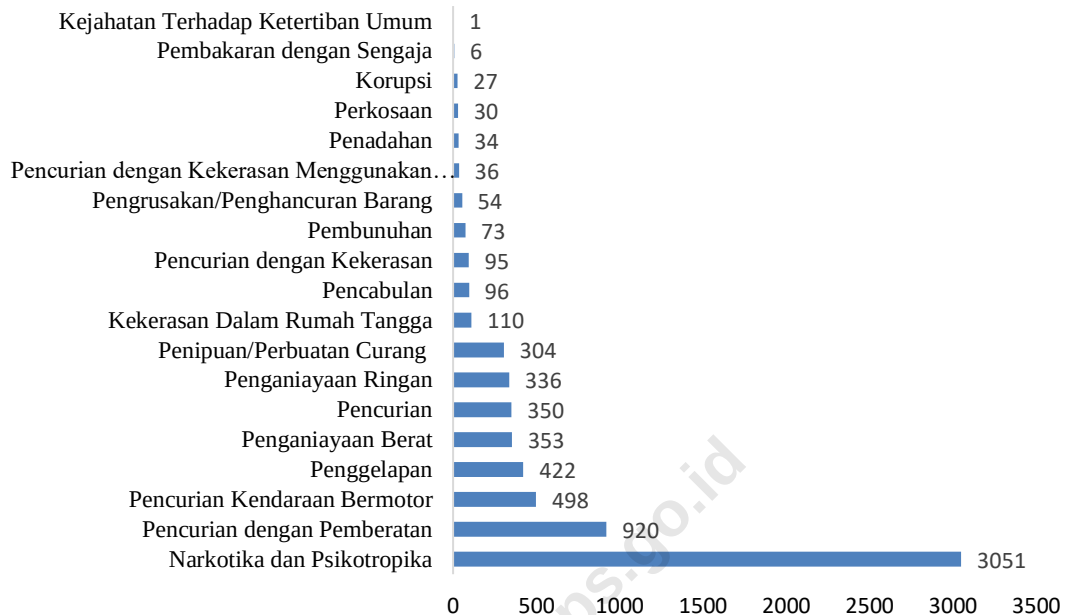
Kota Banjarmasin masih merupakan wilayah yang penduduknya berisiko paling besar terkena tindak kejahatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Setiap 100.000 penduduk Banjarbaru, 186 orang di antaranya berisiko terkena tindak kejahatan pada tahun 2022. Sebaliknya kabupaten dengan risiko terkecil penduduknya terkena tindak kejahatan adalah Kabupaten Barito Kuala, yaitu 58 orang dari 100.000 penduduk Barito Kuala berisiko mengalami tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2022 adalah kejahatan narkoba dan psikotropika yaitu sebesar 43,38 persen (2483 laporan). Kejahatan pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan lainnya yang memiliki persentase terbesar kedua dan ketiga, yaitu sebesar 12,56 persen (719 laporan) dan 7,84 persen (449 laporan).

Selain jenis kejahatan konvensional, yaitu kejahatan transnasional dan kejahatan kekayaan negara tidak lagi dikumpulkan datanya pada pendataan Statistik Politik Keamanan BPS. Jumlah kejadian kejahatan yang dilaporkan menurut jenisnya tahun 2022 di Lingkup Polda Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 5.031 laporan dengan kasus terselesaikan sebanyak 4.364 laporan. Sedangkan total laporan kejahatan mencakup Polres 13 kabupaten/kota dan Polda Kalimantan Selatan adalah sebanyak 8.622 laporan dengan kasus terselesaikan sebanyak 7.456 laporan.

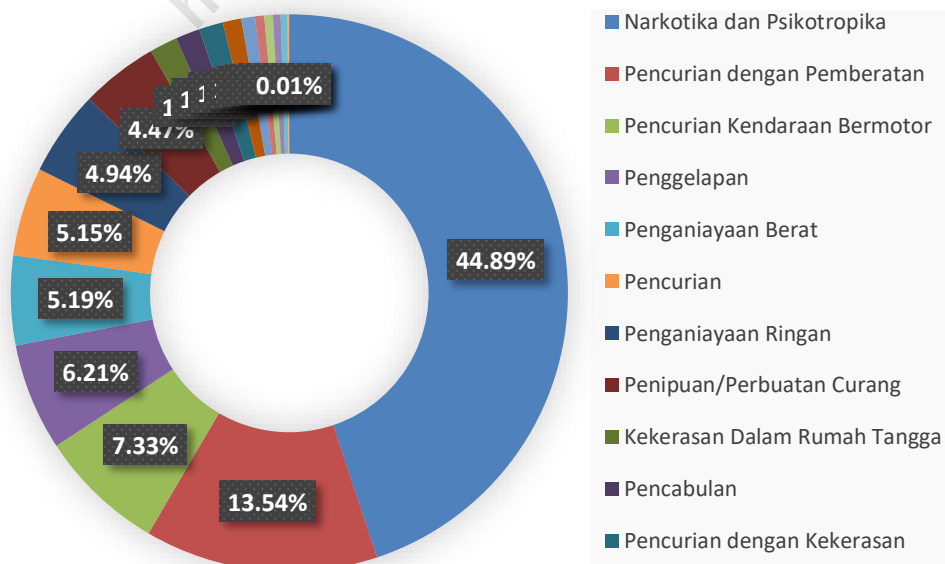
Grafik di bawah menunjukkan jumlah kejadian kejahatan yang dilaporkan menurut jenisnya di Kalimantan Selatan Tahun 2022 (termasuk data Polda), sejumlah 5724 kasus, dengan jumlah kasus lainnya yang tidak tercakup dalam kategori sebanyak 2.898 kasus jika dihitung dari data di atas yang tidak dimasukkan dalam grafik.

Jumlah Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan menurut Jenisnya di Kalimantan Selatan Tahun 2021 (Termasuk Data Polda)



Sumber : Polda dan Polres se-Kalimantan

Jumlah Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan menurut Jenisnya di Kalimantan Selatan Tahun 2021 (Termasuk Data Polda)



Sumber : Polda dan Polres se-Kalimantan

BAB IV

GAMBARAN UMUM POLITIK



Pada 2022,

20,18 persen

kursi DPRD di Kalsel
diduduki oleh kader

**Partai
Golongan Karya**

1 dari **5** anggota DPRD
adalah perempuan

DPRD Kalimantan Selatan
berhasil mengesahkan

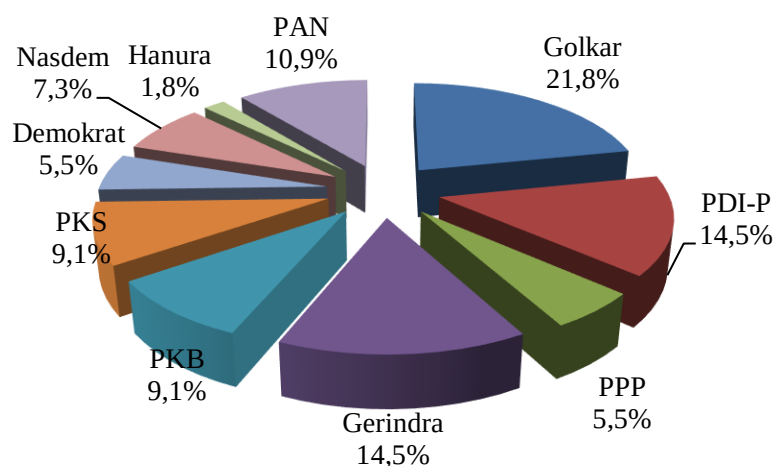
**7 peraturan daerah
dan 1 perda inisiatif**

BAB IV GAMBARAN UMUM POLITIK

4.1. Pemilihan Umum

Pemilu legislatif tahun 2019 diikuti oleh 13 partai politik yang telah lolos seleksi oleh Komisi Pemilihan Umum. Hasil pemilu legislatif di Kabupaten/Kota tidak semua partai politik yang berhasil mengantarkan calon legislatifnya sebagai anggota DPRD/DPR. Partai Golongan Karya dan Gerakan Indonesia Raya berhasil menempatkan calon legislatifnya ke kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan kursi terbanyak. Untuk DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hanya ditempati oleh 10 partai. Partai PKPI, PBB, dan Partai Berkarya tidak berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai partai politik yang telah berpengalaman dalam pemilu, Partai Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dibuktikan bahwa Golkar memperoleh 12 kursi, PDI-P sebanyak 8 kursi dan Gerindra sebanyak 8 kursi dari 55 kursi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang tersedia.

Gambar 4.1. Komposisi Anggota DPRD Kalimantan Selatan Menurut Asal Partai 2019-2024



Partai Golkar masih mendominasi perolehan kursi DPRD kabupaten/kota. Partai berlambang pohon beringin ini memperoleh 89 kursi (20,75 persen) dari total 429 kursi DPRD 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Partai Gerindra dan PDI-

P merupakan partai yang memperoleh kursi DPRD kabupaten/kota terbanyak selanjutnya yaitu masing-masing 57 kursi (13,29 persen) dan 52 kursi (12,12 persen). Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah partai dengan perolehan paling sedikit. Partai yang berdiri pada tahun 1999 ini memperoleh 3 kursi di 2 kabupaten, begitupun untuk Partai Berkarya yang juga hanya mendapat 3 kursi dari 3 kabupaten.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dalam rangka pemilihan bupati-wakil bupati/walikota-wakil walikota/gubernur-wakil gubernur untuk masa jabatan 2021-2024 dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Daerah-daerah yang melaksanakan pilkada 2020 adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 2,794 juta calon pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari pelaksanaan pilkada terdapat 31 ribu orang tambahan yang tidak termasuk dalam (DPT) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan. Angka partisipasi penduduk (voters turn out) dalam Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan adalah 64,64 persen. Dari angka tersebut berarti terdapat sekitar 35,36 persen penduduk Kalimantan Selatan yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan diikuti oleh 2 calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan dalam 1 putaran, diwarnai dengan pemilihan suara ulang (PSU) di 7 kecamatan di Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Juni 2021 menghasilkan pasangan terpilih yaitu Syahbirin dan Muhidin untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2022-2024. Pasangan pemenang yang didukung oleh Partai Golkar, PDI-P, PAN, PKS, PKB, dan Partai NasDem memperoleh 871,1 ribu suara atau sekitar 51,17 persen dari total suara yang sah.

4.2. Karakteristik dan Peran DPRD

Anggota DPRD hasil pemilu legislatif tahun 2020 memiliki mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Peristiwa PAW tersebut salah satunya dapat menyebabkan terjadinya perubahan komposisi anggota DPRD baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan komposisi meliputi aspek jenis kelamin, pendidikan

dan juga kelompok umur. Pada keadaan 31 Desember 2020, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang (20 persen). Dari total 55 orang anggota DPRD. Persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi tersebut masih di bawah komposisi ideal yang ditetapkan oleh UU No 10 Tahun 2008 pasal 57 yaitu sebesar 30 persen.

Kondisi yang sama terjadi pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Komposisi perempuan di DPRD kabupaten/kota belum mencapai pada angka 30 persen. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi untuk anggota DPRD perempuan adalah di Kabupaten Banjar dengan persentase sebesar 31,11 persen. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah yang terendah dibandingkan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Dari total 30 anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hanya terdapat 2 orang yang berjenis kelamin perempuan (6,67 persen). Terjadi pergantian anggota DPRD provinsi dari laki-laki menjadi perempuan selama periode 2017-2020, sebab pada akhir tahun 2017 jumlah anggota DPRD perempuan tercatat hanya sebanyak 7 orang (12,73 persen).

DPRD memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menerapkan fungsi legislasinya, peran DPRD dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkan baik berupa peraturan daerah maupun keputusan anggota/pimpinan DPRD. Selama tahun 2020, terdapat 19 peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan 2 di antaranya merupakan perda inisiatif dewan.

LAMPIRAN

<https://kalsel.bps.go.id>

Halaman Kosong

<https://kalsel.bps.go.id>

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2021

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	38.744,23	11	135	354,34
Kotabaru	3.631,35	22	202	329,48
Banjar	9.482,73	20	290	572,11
Barito Kuala	4.668,00	17	201	316,96
Tapin	2.996,46	12	135	191,80
Hulu Sungai Selatan	2.700,82	11	148	229,96
Hulu Sungai Tengah	1.804,94	11	169	260,75
Hulu Sungai Utara	1.472,00	10	219	228,83
Tabalong	.892,70	12	131	256,9
Tanah Bumbu	3.766,97	12	149	328,15
Balangan	5.006,96	8	156	132,21
Banjarmasin	1.878,30	5	52	662,32
Banjarbaru	72,00	5	20	258,75
Kalimantan Selatan	37.530,52	156	2 007	4 122,58

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022

*) Hasil Proyeksi Interim SP2020

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja, 2021

Kabupaten/Kota	Polda	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	0	1	9	1
Kotabaru	0	1	18	7
Banjar	0	1	14	3
Barito Kuala	0	1	17	3
Tapin	0	1	12	1
Hulu Sungai Selatan	0	1	10	3
Hulu Sungai Tengah	0	1	9	0
Hulu Sungai Utara	0	1	7	0
Tabalong	0	1	12	0
Tanah Bumbu	0	1	10	3
Balangan	0	1	6	2
Banjarmasin	1	1	6	13
Banjarbaru	0	1	5	3
Jumlah	1	13	135	39

Sumber: Polres Se-Kalimantan Selatan

Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Ada Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres dan Polda)		Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Laut	20	115	26	85	0	4
Kotabaru	41	161	19	101	33	8
Banjar	21	269	38	184	47	0
Barito Kuala	21	180	34	135	11	0
Tapin	14	121	47	64	10	0
Hulu Sungai Selatan	15	133	51	80	2	0
Hulu Sungai Tengah	15	154	47	98	4	5
Hulu Sungai Utara	10	209	150	54	5	0
Tabalong	17	114	9	99	1	5
Tanah Bumbu	43	106	18	77	10	1
Balangan	7	149	59	85	5	0
Banjarmasin	18	34	28	6	0	0
Banjarbaru	9	11	3	8	0	0
Jumlah	251	1.756	529	1.076	128	23

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Tabel 4. Jumlah Anggota Hansip/Linmas dan Rasio Hansip/Linmas per Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Hansip / Linmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Rasio Hansip / Linmas per Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	1.508	135	11
Kotabaru	852	202	4
Banjar	2.668	290	9
Barito Kuala	872	201	4
Tapin	519	135	4
Hulu Sungai Selatan	290	148	2
Hulu Sungai Tengah	144	169	1
Hulu Sungai Utara	1.267	219	6
Tabalong	1.035	131	8
Tanah Bumbu	1.572	149	11
Balangan	2.340	156	15
Banjarmasin	253	52	5
Banjarbaru	147	20	7
Kalimantan Selatan	13.467	2.007	7

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Tabel 5. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022^{*)}

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	215	169	236
Kotabaru	438	345	399
Banjar	399	399	0
Barito Kuala	154	128	185
Tapin	276	221	259
Hulu Sungai Selatan	326	133	178
Hulu Sungai Tengah	281	175	237
Hulu Sungai Utara	228	132	160
Tabalong	199	175	180
Tanah Bumbu	380	344	408
Balangan	105	100	119
Banjarmasin	816	990	1236
Banjarbaru	649	280	308
Jumlah	4.466	3.591	4.352

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

^{*)} = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022^{*)}

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	204	200	179
Kotabaru	379	284	301
Banjar	338	338	401
Barito Kuala	102	118	128
Tapin	244	235	247
Hulu Sungai Selatan	318	117	116
Hulu Sungai Tengah	209	99	163
Hulu Sungai Utara	206	120	119
Tabalong	169	157	147
Tanah Bumbu	287	270	321
Balangan	76	70	86
Banjarmasin	645	830	960
Banjarbaru	559	254	281
Jumlah	3.736	3.092	3.446

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

^{*)} = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 7. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Crime Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022^{*)}

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	94,88	96,77	75,85
Kotabaru	86,53	84,26	75,44
Banjar	84,71	85,38	89,71
Barito Kuala	66,23	81,15	69,19
Tapin	88,41	82,66	95,37
Hulu Sungai Selatan	97,55	89,49	65,17
Hulu Sungai Tengah	74,38	64,39	68,78
Hulu Sungai Utara	90,35	92,52	74,38
Tabalong	84,92	104,83	81,67
Tanah Bumbu	75,53	75,00	78,68
Balangan	72,38	80,00	72,27
Banjarmasin	79,04	81,28	77,67
Banjarbaru	86,13	94,79	91,23
Kalimantan Selatan	80,57	84,74	81,11

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

^{*)} = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 8. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022^{*)}

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	40 jam 44' 55"	52 jam 50' 04"	37 jam 07' 07"
Kotabaru	20 jam 00' 24"	25 jam 23' 29"	21 jam 57' 18"
Banjar	21 jam 57' 0"	21 jam 57' 18"	19 jam 35' 50"
Barito Kuala	56 jam 52' 0"	68 jam 26' 15"	47 jam 21' 05"
Tapin	31 jam 44' 48"	39 jam 38' 17"	33 jam 49' 21"
Hulu Sungai Selatan	26 jam 52' 24"	65 jam 51' 53"	49 jam 12' 49"
Hulu Sungai Tengah	31 jam 10' 12"	50 jam 03' 26"	36 jam 57' 43"
Hulu Sungai Utara	38 jam 25' 12"	66 jam 21' 49"	54 jam 45' 00"
Tabalong	44 jam 01' 12"	50 jam 03' 26"	48 jam 40' 00"
Tanah Bumbu	23 jam 03' 00"	25 jam 27' 54"	21 jam 28' 14"
Balangan	83 jam 25' 48"	87 jam 36' 00"	73 jam 36' 48"
Banjarmasin	10 jam 44' 24"	8 jam 50' 55"	7 jam 05' 15"
Banjarbaru	13 jam 30' 00"	31 jam 17' 09"	28 jam 26' 30"
Rata-rata Kalsel	2 jam 10' 55"	1 jam 44' 28"	1 jam 30' 56"

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

NA = Data tidak tersedia

^{*)} = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

^{**)} = Tidak Termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 9. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022^{*)}

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	62	48	65
Kotabaru	126	105	119
Banjar	67	70	77
Barito Kuala	49	40	61
Tapin	143	115	132
Hulu Sungai Selatan	136	58	65
Hulu Sungai Tengah	102	67	92
Hulu Sungai Utara	95	58	69
Tabalong	77	68	69
Tanah Bumbu	103	105	100
Balangan	79	76	88
Banjarmasin	114	149	100
Banjarbaru	247	108	115
Rata-rata Kalsel	93	122	122

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

^{*)} = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 10. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan, Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Pencurian	Pencurian Dengan Kekerasan	Penipuan/ Penggelapan	Penganiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	46	0	8	5
Kotabaru	19	1	4	4
Banjar	92	3	4	9
Barito Kuala	32	3	2	3
Tapin	35	1	3	2
Hulu Sungai Selatan	22	0	1	1
Hulu Sungai Tengah	97	2	13	3
Hulu Sungai Utara	44	0	4	5
Tabalong	29	2	6	3
Tanah Bumbu	42	2	9	3
Balangan	70	1	9	3
Banjarmasin	30	2	2	8
Banjarbaru	9	0	1	2
Kalimantan Selatan	567	17	66	51

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Tabel 10. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pembakaran	Perkosaan	Penyalah- gunaan / Peredaran Narkoba	Perjudian
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tanah Laut	1	3	20	13
Kotabaru	0	1	10	3
Banjar	7	1	44	13
Barito Kuala	0	2	18	3
Tapin	0	1	31	2
Hulu Sungai Selatan	0	0	9	2
Hulu Sungai Tengah	0	2	55	28
Hulu Sungai Utara	3	2	38	10
Tabalong	3	2	31	20
Tanah Bumbu	1	0	7	5
Balangan	0	0	36	11
Banjarmasin	0	1	37	8
Banjarbaru	1	1	4	0
Kalimantan Selatan	16	16	340	118

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Tabel 10. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pembunuhan	Perdagangan Orang	Tidak Ada Tindak Kejahatan
(1)	(10)	(11)	(12)
Tanah Laut	4	0	80
Kotabaru	3	0	169
Banjar	5	0	173
Barito Kuala	3	0	153
Tapin	3	0	86
Hulu Sungai Selatan	1	0	119
Hulu Sungai Tengah	9	0	55
Hulu Sungai Utara	0	0	145
Tabalong	2	1	81
Tanah Bumbu	2	0	104
Balangan	2	0	76
Banjarmasin	6	0	10
Banjarbaru	0	0	11
Kalimantan Selatan	40	1	1.262

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Tabel 11. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Perkelahian Massal Setahun Terakhir Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/Kelurahan	Warga Dengan Aparat Keamanan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	0	0	0
Kotabaru	0	1	0
Banjar	1	1	0
Barito Kuala	0	0	0
Tapin	0	0	0
Hulu Sungai Selatan	0	0	0
Hulu Sungai Tengah	5	2	0
Hulu Sungai Utara	2	1	0
Tabalong	0	0	0
Tanah Bumbu	0	0	0
Balangan	0	0	0
Banjarmasin	0	0	0
Banjarbaru	0	0	0
Kalimantan Selatan	8	5	0

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Tabel 11. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Warga Dengan Aparat Pemerintah	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tanah Laut	0	0	0	0
Kotabaru	0	2	0	0
Banjar	0	0	0	0
Barito Kuala	0	0	0	0
Tapin	0	0	0	0
Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0
Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
Tabalong	0	0	0	0
Tanah Bumbu	0	0	0	0
Balangan	0	0	0	0
Banjarmasin	0	0	0	0
Banjarbaru	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	0	2	0	0

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Tabel 12. Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan Tahun 2022^{*)}

Kabupaten/Kota	Pembunuhan	Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	2	7	4	1
Kotabaru	1	0	20	0
Banjar	3	34	11	5
Barito Kuala	0	13	2	4
Tapin	7	8	4	4
Hulu Sungai Selatan	1	0	8	4
Hulu Sungai Tengah	6	0	8	0
Hulu Sungai Utara	1	7	0	1
Tabalong	0	2	22	6
Tanah Bumbu	3	26	2	6
Balangan	0	3	3	7
Banjarmasin	9	43	77	N/A
Banjarbaru	2	30	9	3
Jumlah	35	173	170	41

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

^{*)} = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerja kan Anak Dibawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tanah Laut	2	3	0	0
Kotabaru	1	0	0	0
Banjarnegara	4	8	0	0
Barito Kuala	0	4	0	0
Tapin	0	1	0	0
Hulu Sungai Selatan	1	6	0	0
Hulu Sungai Tengah	1	2	0	0
Hulu Sungai Utara	1	1	0	0
Tabalong	0	0	0	0
Tanah Bumbu	2	8	0	0
Balangan	0	0	0	0
Banjarmasin	2	6	N/A	N/A
Banjarbaru	1	16	2	0
Jumlah	15	55	2	0

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Menggunaka n Senjata Api (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan Menggunaka n Senjata Tajam	Pencurian
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tanah Laut	4	0	14	0
Kotabaru	3	0	0	8
Banjar	2	0	5	19
Barito Kuala	3	0	0	41
Tapin	1	0	0	0
Hulu Sungai Selatan	3	0	0	7
Hulu Sungai Tengah	4	0	0	0
Hulu Sungai Utara	0	0	7	9
Tabalong	1	0	0	10
Tanah Bumbu	3	0	0	15
Balangan	0	0	10	27
Banjarmasin	18	N/A	N/A	N/A
Banjarbaru	5	0	0	94
Jumlah	47	0	36	230

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tanah Laut	35	19	0	0
Kotabaru	56	13	1	0
Banjar	54	49	9	0
Barito Kuala	0	20	0	0
Tapin	13	8	0	0
Hulu Sungai Selatan	23	4	0	0
Hulu Sungai Tengah	29	25	1	1
Hulu Sungai Utara	16	13	0	0
Tabalong	25	13	2	1
Tanah Bumbu	26	14	0	2
Balangan	23	11	1	0
Banjarmasin	97	50	7	2
Banjarbaru	48	11	4	0
Jumlah	445	250	25	6

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Penadahan	Narkotika dan Psikotropika	Penipuan/Per- buatan Curang	Penggelapan
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tanah Laut	2	106	0	11
Kotabaru	8	58	14	24
Banjar	0	144	20	19
Barito Kuala	0	136	0	0
Tapin	0	96	3	4
Hulu Sungai Selatan	1	119	2	5
Hulu Sungai Tengah	0	68	9	3
Hulu Sungai Utara	0	68	1	4
Tabalong	0	79	12	17
Tanah Bumbu	3	165	31	19
Balangan	0	46	6	9
Banjarmasin	2	262	N/A	N/A
Banjarbaru	18	0	0	18
Jumlah	34	1347	98	133

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Korupsi	Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(22)	(23)
Tanah Laut	0	0
Kotabaru	1	0
Banjar	0	0
Barito Kuala	1	0
Tapin	1	0
Hulu Sungai Selatan	1	0
Hulu Sungai Tengah	0	0
Hulu Sungai Utara	1	0
Tabalong	0	0
Tanah Bumbu	0	0
Balangan	1	0
Banjarmasin	N/A	3
Banjarbaru	2	0
Jumlah	8	3

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan

*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Tabel 13. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Warga Untuk Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir, 2021

Kabupaten/Kota	Pembangunan /Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan	Pembentukan /Pengaturan Regu Keamanan	Penambahan Jumlah Anggota Hansip /Linmas	Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih Dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan Berasal Dari Inisiatif Warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	78	62	34	103	81
Kotabaru	107	81	12	170	104
Banjar	135	86	40	166	140
Barito Kuala	63	39	11	154	76
Tapin	59	17	5	89	28
Hulu Sungai Selatan	83	29	3	84	61
Hulu Sungai Tengah	71	14	3	92	56
Hulu Sungai Utara	76	75	15	92	67
Tabalong	103	53	18	110	80
Tanah Bumbu	114	91	18	130	106
Balangan	74	81	10	90	49
Banjarmasin	37	19	12	50	48
Banjarbaru	15	9	0	17	16
Kalimantan Selatan	1.015	656	181	1.347	912

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2021

Tabel 14. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2019 Menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik

Kabupaten/Kota	Nasdem	PKB	PKS	PDI-P	Golkar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	4	3	3	6	4
Kotabaru	2	4	2	7	5
Banjar	7	5	2	2	8
Barito Kuala	2	3	4	3	16
Tapin	2	3	2	3	8
Hulu Sungai Selatan	7	3	7	3	4
Hulu Sungai Tengah	4		3	2	6
Hulu Sungai Utara	2	5	3	1	12
Tabalong	2	2	4	3	4
Tanah Bumbu	1	5	1	13	6
Balangan	2	1	3	1	5
Banjarmasin	1	5	5	5	6
Banjarbaru	4	3	2	3	5
Kalimantan Selatan	4	5	5	8	12

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Provinsi Kalimantan Selatan

Keterangan :

1. Nasdem : Nasional Demokrat
2. PKB : Partai Kebangkitan Bangsa
3. PKS : Partai Keadilan Sejahtera
4. PDI-P : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Golkar : Partai Golongan Karya

Tabel 14. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tanah Laut	6	2	3	2
Kotabaru	2	1	3	4
Banjar	8	4	3	5
Barito Kuala	3	0	3	1
Tapin	2	2	1	1
Hulu Sungai Selatan	2	1	2	1
Hulu Sungai Tengah	8	0	1	3
Hulu Sungai Utara	2	0	0	4
Tabalong	5	3	4	2
Tanah Bumbu	6	0	2	1
Balangan	1	0	2	5
Banjarmasin	6	5	9	2
Banjarbaru	6	1	2	4
Kalimantan Selatan	8	3	6	3

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Provinsi Kalimantan Selatan

Keterangan :

- 6. Gerindra : Partai Gerakan Indonesia Raya
- 7. PAN : Partai Amanat Nasional
- 8. PPP : Partai Persatuan Pembangunan

Tabel 14. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Hanura	PKPI	PBB	Berkarya	Jumlah
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Tanah Laut	2	0	0	0	35
Kotabaru	3	0	1	0	34
Banjar	1	0	0	0	45
Barito Kuala	0	0	0	0	35
Tapin	0	0	0	1	25
Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0	30
Hulu Sungai Tengah	0	1	1	1	30
Hulu Sungai Utara	0	0	1	0	30
Tabalong	0	0	0	1	30
Tanah Bumbu	0	0	0	0	35
Balangan	1	2	2	0	25
Banjarmasin	0	0	1	0	45
Banjarbaru	0	0	0	0	30
Kalimantan Selatan	1	0	0	0	55

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Provinsi Kalimantan Selatan

Keterangan :

9. Hanura : Partai Hati Nurani Rakyat

10. PKPI : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

11. PBB : Partai Bulan Bintang

Tabel 15. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2019 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Kondisi 31 Desember 2022)

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	25	10	35
Kotabaru	27	8	35
Banjar	31	14	45
Barito Kuala	27	8	35
Tapin	21	4	25
Hulu Sungai Selatan	28	2	30
Hulu Sungai Tengah	24	6	30
Hulu Sungai Utara	23	7	30
Tabalong	22	8	30
Tanah Bumbu	30	5	35
Balangan	21	4	25
Banjarmasin	34	11	45
Banjarbaru	25	5	30
Kalimantan Selatan	44	11	55

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 16. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Terakhir Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pemilukada Terakhir
(1)	(2)
Tanah Laut	27 Juni 2018
Kotabaru	9 Desember 2020
Banjar	9 Desember 2020
Barito Kuala	15 Februari 2017
Tapin	27 Juni 2018
Hulu Sungai Selatan	27 Juni 2018
Hulu Sungai Tengah	9 Desember 2020
Hulu Sungai Utara	15 Februari 2017
Tabalong	27 Juni 2018
Tanah Bumbu	9 Desember 2020
Balangan	9 Desember 2020
Banjarmasin	9 Desember 2020
Banjarbaru	9 Desember 2020
Kalimantan Selatan	9 Desember 2020

Sumber: KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 17. Jumlah Penduduk yang Terdaftar. Menggunakan Hak Pilih. dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Gubernur 2020 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Terdaftar		Menggunakan Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih
	Terdaftar di DPT	Pemilih dengan KTP/Surat Keterangan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	232.536	1.090	148.788	4.808	91.355
Kotabaru	209.201	*	148.495	*	*
Banjar	389.993	*	291.099	*	*
Barito Kuala	220.006	2.187	152.115	5.575	63.448
Tapin	132.188	22	96.812	5.926	27.818
Hulu Sungai Selatan	165.907	166	115.930	6.058	47.252
Hulu Sungai Tengah	184.855	*	141.959	*	*
Hulu Sungai Utara	161.506	686	104.980	7.971	46.364
Tabalong	170.212	4.626	122.716	3.324	47.022
Tanah Bumbu	448.157	*	181.321	*	*
Balangan	85.741	*	76.538	*	*
Banjarmasin	436.956	*	232.625	*	*
Banjarbaru	144.885	*	110.445	*	*
Kalimantan Selatan	2.793.811	31.009	1.702.301	134.760	987.759

Sumber: KPUD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Keterangan: Data Pemilukada 2020 belum tersedia

Tabel 18. Jumlah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Terakhir Jumlah Putaran Pelaksanaan Pemilukada, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta		Jumlah Putaran Pelaksanaan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Terpilih		Partai Pengusung Calon Terpilih
	Duku- ngan Parpol	Perora- ngan		Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Laut	2	0	1	107.899	62,33%	Partai Gerindra, PKPI, dan PKS
Kotabaru	1	1	1	74.635	50,26%	Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS, Partai Perindo, Partai Demokrat, PBB
Banjar	2	1	1	141.955	48,77%	Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat
Barito Kuala	3	0	1	74.169	48,76%	Partai Golkar
Tapin	1	0	1	85.826	80,89%	PAN, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, PDIP, PKB, dan Partai Golkar
Hulu Sungai Selatan	1	1	1	78.281	65,47%	PKS, Partai Golkar, NasDem, Gerindra, Demokrat dan PBB
Hulu Sungai Tengah	2	3	1	62.756	44,21%	-
Hulu Sungai Utara	2	0	1	72.265	68,84%	Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, PKS, Partai Demokrat, PBB
Tabalong	2	2	1	44.736	35,92%	PDIP, Partai Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, PKS, PBB, PKB, dan PKPI.
Tanah Bumbu	2	1	1	104.354	57,55%	PKB, Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem, PKS
Balangan	2	0	1	47.115	61,56%	PPP, PDIP, Partai NasDem, Partai Demokrat
Banjarmasin	3	1	1	89.378	37,96%	Partai Demokrat, PKB, PDIP
Banjarbaru	3	0	1	43.351	39,25%	PPP, PDIP, Partai Gerindra
Kalimantan Selatan	2	0	1	871.123	51,17%	Partai Golkar, PDIP, PAN, PKS, PKB, Partai NasDem

Sumber: KPUD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 19. Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Terakhir serta Jabatan Sebelum Terpilih Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Usia Saat Pelantikan	Pendidikan Terakhir	Jabatan / Pekerjaan Sebelum Terpilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	Laki-laki	55	S1	Wakil Bupati Tanah Laut
Kotabaru	Laki-laki	58	S1	Bupati Kotabaru
Banjar	Laki-laki	33	S1	Wakil Bupati Banjar
Barito Kuala	Perempuan	58	S1	Ketua DPRD Provinsi Kalsel
Tapin	Laki-laki	63	S2	Bupati Tapin
Hulu Sungai Selatan	Laki-laki	62	S2	Bupati Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Tengah	Laki-laki	36	S2	Anggota DPRD Provinsi Kalsel
Hulu Sungai Utara	Laki-laki	57	S2	Bupati Hulu Sungai Utara
Tabalong	Laki-laki	58	S2	Bupati Tabalong
Tanah Bumbu	Laki-laki	66	S1	Anggota DPR RI
Balangan	Laki-laki	61	S2	Anggota DPRD Kabupaten Balangan
Banjarmasin	Laki-laki	46	S2	Walikota Banjarmasin
Banjarbaru	Laki-laki	36	S2	Pengusaha
Kalimantan Selatan	Laki-laki	53	S2	Gubernur Kalimantan Selatan

Sumber: KPUD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 20. Hasil Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Terakhir serta Jabatan Sebelum Terpilih Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Usia Saat Pelantikan	Pendidikan Terakhir	Jabatan / Pekerjaan Sebelum Terpilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	Laki-laki	44	S1	Anggota DPRD Kab. Tanah Laut
Kotabaru	Laki-laki	38	S1	Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru
Banjar	Laki-laki	60	SMA	Swasta
Barito Kuala	Perempuan	42	S1	Anggota DPRD Kab. Barito Kuala
Tapin	Laki-laki	50	S1	Swasta
Hulu Sungai Selatan	Laki-laki	46	S1	Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Tengah	Laki-laki	68	S1	Anggota DPRD Provinsi Kalsel
Hulu Sungai Utara	Laki-laki	61	S1	Wakil Bupati Hulu Sungai Utara
Tabalong	Laki-laki	61	S2	Anggota DPRD Kab. Tabalong
Tanah Bumbu	Laki-laki	52	S1	PNS
Balangan	Laki-laki	60	S2	Wakil Bupati Balangan
Banjarmasin	Laki-laki	61	S1	PNS
Banjarbaru	Laki-laki	55	S1	Anggota DPRD Banjarbaru
Kalimantan Selatan	Laki-laki	63	S2	Pengusaha

Sumber: KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 21. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Menurut DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah		Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	8	6	3	0
Kotabaru	17	17	4	3
Banjar	11	11	1	2
Barito Kuala	5	8	0	2
Tapin	6	4	4	3
Hulu Sungai Selatan	25	10	2	6
Hulu Sungai Tengah	11	7	0	3
Hulu Sungai Utara	13	12	4	4
Tabalong	11	7	0	1
Tanah Bumbu	10	15	4	6
Balangan	16	8	4	1
Banjarmasin	9	7	0	1
Banjarbaru	15	15	2	1
Kalimantan Selatan	7	5	1	29

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 22. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	2021		2022	
	Mendaftar Tahun Ini	Jumlah Terdaftar	Mendaftar Tahun Ini	Jumlah Terdaftar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	5	317	15	607
Kotabaru	45	1802	31	1834
Banjar	16	88	34	218
Barito Kuala	6	124	7	131
Tapin	5	50	3	53
Hulu Sungai Selatan	6	53	5	58
Hulu Sungai Tengah	8	244	16	263
Hulu Sungai Utara	58	58	44	194
Tabalong	0	37	187	463
Tanah Bumbu	33	395	16	409
Balangan	0	0	5	37
Banjarmasin	22	158	12	170
Banjarbaru	0	48	1	49
Kalimantan Selatan	0	0	0	0

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman Kosong

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan Trikora Nomor 7 Banjarbaru 70713

Telepon 0511-6749001 Email: bps6300@bps.go.id Website: <http://kalsel.bps.go.id>

